

Judul : Harga pupuk subsidi turun 20 persen, petani kembali semangat, produksi pangan terjaga
Tanggal : Sabtu, 25 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Harga Pupuk Subsidi Turun 20 Persen

Petani Kembali Semangat, Produksi Pangan Terjaga

Keputusan Pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen mulai Rabu (22/10/2025) dianggap jadi langkah penting untuk meringankan beban petani.

ANGGOTA Komisi IV DPR Sulaeman L Hamzah menilai, mahalnya harga pupuk membuat petani mengurangi dosis pemupukan dan berdampak pada penurunan produktivitas. Seperti menurunkan dosis pupuk nitrogen (urea) hingga 10 persen, yang berujung penurunan hasil

panen padi 5-7 persen.

Karena itu, penurunan harga pupuk bersubsidi meringankan beban petani dan membuat mereka semakin bersemangat. "Nah, keputusan Pemerintah ini tepat sekali untuk menjaga produksi pangan nasional," jelas Sulaeman dalam keterangannya,

Kamis (23/10/2025).

Legislator Fraksi Partai Nas-Dem menyebut, kebijakan Pemerintah tersebut pastinya sudah dihitung dengan matang, sehingga harus mendapatkan dukungan semua pihak. Kebijakan ini merupakan langkah cepat dan terukur untuk meringankan biaya produksi petani.

"Kebijakan ini juga menjaga daya beli di tingkat usaha tani, dan bisa mempercepat tercapainya target swasembada pangan nasional," jelasnya.

Dengan kebijakan ini, harga urea kini jadi Rp 1.800 per kg, atau Rp 90 ribu per sak (50 kg). Selanjutnya, NPK menjadi Rp 1.840 per kg (Rp 92 ribu/sak), NPK khusus kakao jadi Rp 2.640 per kg (Rp 132 ribu/sak), ZA menjadi Rp 1.360 per kg (Rp 68 ribu per/sak) serta pupuk organik menjadi Rp 640/kg dari sebelumnya Rp 800/kg.

"Penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) ini memberikan kepastian harga di kios resmi akan menjadi penopang bagi

usaha tani jelang puncak musim tanam," jelasnya.

Senada, anggota Komisi IV DPR Adrianus Asia Sidot mengingatkan, distribusi pupuk subsidi harus diawasi ketat untuk memastikan manfaatnya sampai ke petani.

Dengan demikian, manfaat penurunan harga pupuk dapat benar-benar dirasakan para petani. Pengawasan yang efektif akan mencegah praktik penimbunan atau penjualan di atas HET. ■ PVB